

NASIB DIASPORA PALESTINA DI KUWAIT: ANTARA RUMAH KEDUA DAN DAMPAK PERANG TELUK

Mufti Rasyid

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
e-mail: mufti.rasyid@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

The Gulf region in the Middle East has long been attracting Palestinian diaspora who were expelled from their country because of the Israeli occupation. One of the Gulf States with large population of Palestinian diaspora is Kuwait, which used to be referred as 'the Second Home' for them. Unfortunately, along with geopolitical developments in The Gulf region, they face many challenges for their survival. This article is aimed to explain the development of Palestinian diaspora in the Gulf region along with the effects of Gulf War on them. This research was written with a qualitative descriptive method. The results of the study show that the development of Palestinian diaspora in the Gulf region is marked by three major events: The 1948 Nakba, The 1967 Naksa and 1973 Arab-Israel War. Meanwhile, the gulf war which happened because the Iraqi invasion on Kuwait in 1991 fatally effected them in the forms of discrimination, persecution and massive exodus from Kuwait.

Keywords : diaspora, Palestina, Kuwait, Perang Teluk

ABSTRAK

Kawasan Teluk di Timur Tengah yang kaya minyak bumi telah lama menarik perhatian diaspora Palestina yang terusir dari negaranya karena penjajahan Israel. Salah satu negara Teluk yang memiliki diaspora Palestina terbanyak adalah Kuwait, hingga sempat dijuluki 'rumah kedua' bagi mereka. Seiring dengan perkembangan geopolitik di kawasan Teluk, mereka banyak menghadapi tantangan demi keberlangsungan hidup mereka. Artikel ini disusun untuk menjelaskan perkembangan diaspora Palestina di Kuwait beserta dampak yang mereka hadapi pasca Perang Teluk. Penelitian ini ditulis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan diaspora Palestina di kawasan Teluk dipengaruhi oleh 3 peristiwa besar yaitu: Peristiwa Nakba 1948, Peristiwa Naksa 1967 dan Perang Israel-Arab 1973. Sedangkan Perang Teluk yang terjadi karena invasi Iraq ke Kuwait tahun 1991 berdampak fatal bagi mereka, berupa diskriminasi, persekusi hingga pengusiran besar-besaran dari tanah Kuwait.

Kata kunci: diaspora, Palestina, Kuwait, Gulf War

Pendahuluan

Selama lebih dari enam dekade (1948-2022), konflik Israel-Palestina telah membuat jutaan warga Palestina terusir dari tanah airnya. Besarnya skala dan lamanya konflik telah menjadikan masalah pengungsi Palestina sebagai problem pengungsian yang paling berlarut-larut dan terbesar dalam sejarah dunia. Semuanya berawal dari

gerakan Zionisme, sebuah gerakan politik untuk mendirikan negara Yahudi di Timur Tengah yang digagas pertama kali tahun 1800-an. Dengan semangat hijrah ke "tanah yang dijanjikan", pada tahun 1918, gerakan ini mulai melakukan kampanye besar-besaran agar orang-orang Yahudi di seluruh dunia bermigrasi ke 'tanah leluhur'-nya di Palestina. Fenomena migrasi besar-besaran

ini tentunya menuai banyak konflik, namun berkat kekuasaan penjajah Inggris yang menguasai Palestina saat itu, resistensi warga Palestina bisa ditekan. Hingga akhirnya pada tahun 1948 negara Israel resmi didirikan. Perang besar pun meletus antara Israel dan negara-negara Arab. Israel akhirnya menang. Peristiwa tahun 1948 inilah yang dikenal sebagai an-nakba yang berarti bencana besar. Dengan kemenangan Israel, warga Palestina tercerai berai ke seluruh dunia. Sejarah diaspora Palestina pun dimulai (Clemens, 2007).

Kata 'diaspora' mungkin belum begitu familiar bagi orang awam dibanding kata 'pengungsi'. Saat mendengar kata Palestina pasti yang kita bayangkan adalah pengungsi dengan segala penderitaannya. Keanyataannya, para penduduk Palestina yang terusir dari tanah airnya sangatlah beragam nasibnya. Ada yang hidup di kamp-kamp pengungsian, ada juga yang hijrah ke negara lain sebagai pekerja, pelajar, tentara, bahkan pengusaha. Orang-orang tersebut selain menyelamatkan diri dan menyambung hidup juga berkontribusi bagi negara baru tempat mereka tinggal. Baik para pengungsi maupun para 'perantau', mereka semua bisa kita sebut dengan istilah diaspora.

Diaspora sering didefinisikan sebagai suatu bangsa, penduduk atau etnis tertentu yang meninggalkan tanah air tradisional mereka, biasanya karena paksaan atau tekanan. Budaya yang mereka bawa mempengaruhi penyebaran dan perkembangan mereka di berbagai belahan dunia (Sujatmiko, 2014) Diaspora juga bisa dimaknai sebagai formasi identitas sekumpulan individu maupun kelompok yang - tidak selalu karena paksaan- berada di luar tempat asalnya. Mereka selalu mengusung aspirasi dan menuntut rekognisi di negara asal maupun di host country nya dengan berbagai dinamika politiknya (Missbach, 2011). Istilah diaspora ini memang seringkali interchangeable dengan istilah lain seperti migran, pengungsi dan ekspatriat. Bagaimana mereka beradaptasi

sangat menentukan survival mereka di negara mereka tinggal.

Kembali ke diaspora Palestina, salah satu kawasan yang memiliki jumlah diaspora Palestina yang signifikan adalah kawasan Teluk. Yang dimaksud dengan kawasan Teluk (The Gulf) adalah negara-negara yang memiliki garis pantai di Teluk Arab/ Teluk Persia seperti: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA) atau Bahrain. Jumlah diaspora Palestina di kawasan Teluk memang tidak sebanyak kawasan lainnya seperti kawasan 'The Levant' (Lebanon, Suriah atau Yordania) yang menjadi tetangga Palestina. Yang menarik adalah, kondisi diaspora Palestina di dua kawasan tersebut sangatlah berbeda. Di kawasan 'The Levant', mereka kebanyakan hidup di kamp-kamp pengungsian dalam keadaan yang seringkali memprihatinkan. Sebaliknya para diaspora Palestina di negara-negara Teluk kebanyakan terdiri dari para pekerja. Hal ini dikarenakan negara-negara Teluk tidak menerima pengungsi; sebaliknya, mereka menerima imigran yang datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Salah satu negara di kawasan Teluk yang paling banyak menerima diaspora Palestina adalah Kuwait. Kuwait merupakan kawasan dengan potensi sumber daya alam yang sangat kaya, terutama dengan kandungan minyak dan gas buminya. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi diaspora Palestina karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta. Selama puluhan tahun, pada diaspora Palestina telah menjadi bagian integral dari masyarakat Kuwait. Demografi diaspora Palestina di Kuwait mencapai puncaknya di tahun 1980-an, dimana 1 dari 5 penduduk Kuwait adalah orang Palestina. Saking banyaknya diaspora Palestina disana, sampai – sampai Kuwait dianggap sebagai 'Rumah Kedua' bagi mereka.

Sayangnya, semua momen bahagia diaspora Palestina di Kuwait tiba-tiba sirna saat Iraq menginvasi Kuwait pada awal tahun 1991. Invasi ini memicu konflik bersenjata

terbesar dalam sejarah dunia pasca Perang Dunia II: Perang Teluk. Perang yang melibatkan puluhan negara di dunia ini ternyata berdampak besar dan fatal bagi diaspora Palestina di Kuwait. Bagaikan kiamat, sesuatu yang tak pernah terbayangkan harus mereka alami.

Beberapa peneliti telah melakukan studi tentang isu diaspora Palestina. Syuib (2016) menyatakan bahwa Palestina sebenarnya sudah memenuhi syarat normatif untuk menjadi negara berdaulat, namun kurangnya rekognisi dari dunia internasional membuat daya tawar Palestina sangat lemah. Hal inilah yang membuat warga Palestina merasa insecure di negaranya sendiri sehingga fenomena diaspora tak bisa dihindari. Garini (2006) mengkaji diaspora Palestina yang ada di Lebanon. Massifnya jumlah diaspora disana yang sebagian besar pengungsi membuat masalah sosial baru di Lebanon. Hal ini membuat mereka mengalami diskriminasi baik oleh pemerintah Lebanon maupun masyarakat.

Sementara itu Damanuri (2012) lebih tertarik untuk mengkaji diaspora dari variabel keagamaannya. Menurutnya, diaspora muslim saat ini -termasuk diaspora Palestina- terjebak dalam konflik identitas dan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan terorisme. Diaspora muslim diharap agar mampu menempatkan identitas muslim di satu sisi dan beradaptasi bahkan berintegrasi pada sisi yang lain dengan budaya dimana mereka tinggal. Lebih menarik lagi adalah penelitian Richter-Devroe (2021) yang mengkaji para diaspora Palestina di Yordania. Para generasi muda disana sudah tidak tertarik lagi dengan isu 'merebut kemerdekaan Palestina'. Mereka lebih menyukai konsep transnasionalisme dan translokal dimana mereka memimpikan kesejahteraan dan persatuan diaspora Palestina di bagian dunia manapun mereka berada.

Beberapa penelitian di atas memperkaya kajian diaspora Palestina, mulai dari status kedaulatan Palestina, timbul nya

masalah sosial baru di host country, variabel agama yang sangat mempengaruhi nasib diaspora hingga konsep baru transnasionalisme yang diusung para diaspora milenial. Sayangnya dari beberapa penelitian terdahulu di atas belum ada yang secara spesifik membahas diaspora Palestina di kawasan Teluk, terutama di Kuwait. Padahal, ada banyak hal menarik yang bisa dikaji dari kehidupan para diaspora Palestina di negeri 'petrodollar' ini. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan berikut ini: 1). Bagaimana sejarah perkembangan diaspora Palestina di Kuwait? 2). Apa saja dampak Perang Teluk yang dihadapi diaspora Palestina di Kuwait.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban di atas penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang dijadikan bahan analisis berupa literatur tentang diaspora Palestina di Kuwait baik berupa buku, penelitian terdahulu, artikel, laporan-laporan tertulis, hingga berita yang ada di media massa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik collecting, displaying, analyzing dan concluding

Sejarah Perkembangan Diaspora Palestina di Kuwait

Berbicara tentang sejarah perkembangan migrasi warga Palestina ke Kuwait, kita perlu menyepakati terlebih dahulu batasan waktunya. Disini penulis mengambil batasan 60 tahun sejak tahun 1948 hingga 2018. Dalam kurun waktu ini ada banyak peristiwa yang mengubah sejarah dunia, terutama sejarah Timur Tengah. Disini penulis menggarisbawahi 3 peristiwa besar yang menjadi checkpoint perkembangan diaspora Palestina di Kuwait. Tiga peristiwa tersebut adalah: Peristiwa Nakba 1948, Peristiwa Naksa 1967 dan Perang Iraq-Israel 1973.

1. An-Nakba 1948: Saat Kiamat Tiba

Bulan Desember tahun 1947 hingga April tahun 1948 adalah momen yang tak akan terlupakan dalam memori kolektif diaspora Palestina. Komunitas Arab Palestina kehilangan dirinya sebagai suatu entitas sosial dan politik, sebuah proses yang tidak pernah diramalkan akan terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II. Lebih dari 350 desa di Palestina luluh lantak. Perang dan eksodus membuat 500.000 hingga 1.000.000 warga Palestina mengungsi. Di kota Jaffa saja, populasi Palestina yang awalnya 70.000–80.000 hampir habis hingga tersisa 3.000–4.000 saja (Kimmerling & Migdal, 2006).

Menurut laporan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) tahun 2006, dua tahun pertama saja setelah tragedi Nakba (tahun 1950) jumlah total pengungsi yang terdaftar di PBB telah mencapai lebih dari 900.000 jiwa. Orang-orang terlantar ini tersebar di seluruh wilayah yang masih dikuasai Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, menyebar ke negara tetangga Yordania, Lebanon, dan Suriah. Selain itu, ada 45.800 warga Palestina yang masih tetap bertahan di Israel yang mengharap bantuan PBB sebagai pengungsi internal (Peteet, 2007)



Gambar 01: Pengungsi Palestina 1948
Sumber: Government Press Office/ Flickr
via fpip.org

Sejak peristiwa yang membuat mereka tercerai berai di berbagai daerah (seperti di Tepi Barat, Libanon, dan Suriah) ini, orang-

orang Palestina mulai memutar otak untuk berkelana ke negara-negara yang lebih jauh demi masa depan yang lebih baik. Pada awal 1950-an, ketika produksi minyak mulai berkembang pesat, para petinggi negara-negara Teluk banyak mencari tenaga teknis dan administrasi yang memiliki keterampilan untuk membangun negara mereka. Disinilah orang-orang Palestina mulai berdatangan. Disinilah mereka beruntung karena mereka memenuhi semua persyaratan yang diinginkan, seperti: orang Arab, rata-rata berpendidikan, bisa berbahasa Inggris (Palestina adalah bekas jajahan Inggris), dan tidak terlalu menuntut gaji tinggi (Roleau, 1985)

Salah satu negara Teluk yang paling banyak menerima pekerja migran dari Palestina adalah Kuwait. Jauh sebelum peristiwa Nakba, tepatnya tahun 1930-an, sebenarnya warga Palestina sudah ada yang bermigrasi ke Kuwait yang saat itu masih dikuasai Inggris. Penemuan minyak pertama terjadi pada tahun 1938 di Burgan, yang sampai sekarang masih menjadi ladang minyak terbesar kedua di dunia. Sheikh al-Sabah, membuka lebar pintu masuk negaranya untuk para pekerja asing, terutama orang Palestina yang terkenal giat dan ulet dalam bekerja. Peristiwa Nakba tahun 1948 menjadi titik awal migrasi besar-besaran warga Palestina ke Kuwait untuk mengadu nasib. Antara 1948 dan 1960, ribuan pengungsi dan non-pengungsi Palestina terutama dari Tepi Barat dan Gaza tiba di Kuwait dengan sambutan hangat penguasa Kuwait saat itu. Banyak yang menjadi guru, pegawai negeri, dan pekerja kasar. Pada Juni 1961, ketika Kuwait mendeklarasikan kemerdekaannya, populasi diaspora Palestina telah berkembang menjadi sekitar 40.000, sekitar 12 persen dari seluruh populasi Kuwait yang saat itu hanya berjumlah 321.621 (Rosen, 2012).

2. An-Naksa 1967: Terhapusnya Palestina dari Peta Dunia

Gelombang migrasi kedua terjadi mengiringi perang Israel- Palestina tahun

1967, dikenal dengan sebutan an-naksa (kemunduran) yang dianggap sebagai an-nakba (bencana besar) jilid 2. Perang tahun 1967 ini merupakan garis start episode baru konflik antara Israel dan Palestina. Israel mengalahkan tentara Mesir, Yordania dan Suriah yang membela Palestina. Kemenangan ini membuat mereka merebut Jalur Gaza dan gurun Sinai (dari Mesir); Dataran Tinggi Golan (dari Suriah); dan Tepi Barat dan Yerusalem Timur (dari Yordania). Setelah ribuan tahun, bangsa Israel akhirnya berhasil merebut dan menguasai kawasan yang merupakan poros peradaban 3 agama besar dunia. Palestina pun seakan terhapus dari peta dunia, dengan hanya menyisakan Jalur Gaza dan Tepi Barat yang disebut oleh literatur Barat sebagai sebuah ‘territory’ atau ‘authority’, bukan ‘state’ atau ‘country’.

Warga Palestina semakin tercerabut dari akarnya, mereka berkelana ke berbagai negara di dunia, mengarungi samudra hingga lintas benua. Tak hanya di Asia dan Afrika, mereka pun tersebar hingga Eropa, Amerika Utara, hingga Amerika Latin. Kali ini, mereka mengajak keluarga besarnya untuk mencari keselamatan, sebagian masih berharap suatu saat nanti bisa kembali ke Palestina namun kebanyakan tak bisa kembali. Warga Palestina dengan segala modal yang mereka miliki berusaha bermigrasi ke berbagai negara untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Bagi mereka yang mempunyai dana yang memadai, mereka naik pesawat sedangkan mereka yang tidak punya banyak uang mengambil rute darat. Salah satu destinasi favorit mereka adalah Kuwait, di mana mereka diterima lebih baik daripada di tempat lain, karena keterbukaan penguasa Kuwait saat itu. Hal ini semakin meningkatkan jumlah diaspora Palestina di Kuwait. Komunitas Palestina di Kuwait telah berkembang hampir sepuluh kali lipat, dari 37.000 pada tahun 1961 menjadi 300.000 pada tahun 1981



Gambar 02: Perkembangan Wilayah Yang Diduduki Israel; Sumber: Aljazeera

3. 1973- 1990: Kuwait: “Rumah Kedua”

Gelombang terakhir migrasi Palestina ke Kuwait terjadi pasca perang tahun Israel-Arab tahun 1973 yang dikenal dengan perang Yom Kippur. Mesir dan Suriah saat itu ingin merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Israel tahun 1967. Bukannya berhasil, justru Israel malah berhasil lebih banyak wilayah lagi seperti dataran tinggi Golan. Wilayah-wilayah tersebut banyak dihuni orang Palestina sehingga sekali lagi gelombang migrasi orang Palestina terjadi. Terlepas dari tragedy pasca perang ini, pada masa ini kehidupan diaspora Palestina mulai mapan dan settled.

Di Kuwait pada tahun 1982, diperkirakan satu dari empat pegawai di sektor publik dan satu dari tiga guru adalah warga Palestina. Dengan pendidikan tinggi, warga Palestina banyak berkecimpung di jajaran peradilan, mulai dari jaksa, pengacara hingga hakim. Mereka juga banyak di kalangan jurnalis (baik media cetak maupun elektronik), dokter, insinyur, arsitek, dan pengelola perusahaan minyak dan bisnis swasta. Menurut sebuah studi tahun 1975, satu dari empat orang Palestina yang bekerja di Kuwait memiliki profesi yang berkelas. Pada awal "an-nakba" tahun 1948, hanya ada 300-400 diaspora Palestina yang memiliki ijazah S1. Pada tahun 1985, diperkirakan ada 130.000 lulusan S1, 5 kali lebih tinggi dari rata-rata dunia Arab secara keseluruhan (Rouleau, 1985)



Gambar 03: Kuwait: “Rumah Kedua” bagi diaspora Palestina. Sumber: Wikipedia

Pada penghujung dekade 1980-an, Sebagian besar perusahaan elektronik di Kuwait dan Uni Emirat Arab adalah milik diaspora Palestina, termasuk para pedagang, pengusaha, bankir, dan dealer kendaraan bermotor. Kejayaan diaspora Palestina di Kuwait berbanding terbalik dengan nasib diaspora Palestina di negara-negara Arab lainnya, di mana kurangnya sumber daya alam ditambah rezim yang cenderung otoriter menghambat perekonomian masyarakat. Selama 15 tahun (1975-1990), diaspora Palestina merasakan nikmatnya hidup seperti di rumah sendiri. Kuwait berhasil menjadi “rumah kedua” yang tak hanya menyediakan keamanan tapi juga kesejahteraan diaspora Palestina.

Perang Teluk: Kiamat Kedua Bagi Palestina

Kronologi Perang Teluk

Setelah puluhan tahun merasakan privilege sebagai diaspora Palestina paling beruntung di dunia, tanpa disangka diaspora Kuwait mengalami babak kelam yang dijuluki sebagai kiamat kedua bagi sejarah Palestina. Kiamat itu adalah: Perang Teluk. Jika dulu musuh mereka berbeda agama dan bahasa, kali ini musuh mereka sama-sama beragama Islam dan berbahasa Arab.

Perang Teluk atau Gulf War adalah perang terbuka yang disebabkan oleh Invasi Irak atas Kuwait 2 Agustus 1990. Alasan invasi Irak ke Kuwait ini tidak secara

eksplisit dinyatakan oleh pemerintah Irak, namun sebagian besar orang mempercayai kebangkrutan Irak dalam hal ekonomi akibat Perang Iran-Irak yang terjadi pada tahun 1980-1988 sebagai penyebabnya. Krisi ekonomi pasca perang membuat Irak juga terjerat utang sangat banyak pada Kuwait. Hal ini diperparah dengan anjloknya harga minyak dunia. Irak saat itu jengkel sekali pada Kuwait yang dianggap sebagai penyebab menurunnya harga minyak dunia. Selain itu Iraq juga mengungkit-ungkit sengketa perbatasan Irak-Kuwait warisan dari penjajahan Inggris.

Menjelang subuh pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak secara resmi menginvasi Kuwait dengan melakukan serangkaian serangan udara. Fakta bahwa Irak memiliki militer terkuat di Timur Tengah saat itu membuat Kuwait jatuh sepenuhnya ke tangan Iraq hanya dalam waktu dua hari. Yang bisa dilakukan Militer Kuwait hanyalah membantu proses evakuasi keluarga kerajaan Kuwait ke Arab Saudi. Invasi ini tentu mengundang kecaman dari dunia internasional. Dewan Keamanan PBB secara resmi mengutuk invasi ini hingga menjatuhkan embargo ekonomi pada 6 Agustus 1990. Kuwait tak menghiraukannya bahkan dengan berani memproklamkan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak 28 Agustus 1990.

Dalam iklim perang dingin yang melanda dunia saat itu, tentu saja, konflik di Kuwait ini turut mengundang negara-negara besar dunia untuk turut campur. Amerika Serikat sebagai ‘polisi dunia’ mengirim bala tentaranya ke medan perang via Arab Saudi disusul negara-negara lain di timur tengah. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis dan Jerman Barat tak mau ketinggalan. Bahkan negara-negara Afrika seperti Ghana dan Asia Timur seperti Korea Selatan juga turut bergabung. Perang dengan skala besar dengan tajuk Operasi Badai Gurun dimulai tanggal 17 Januari 1991 pukul 03:00 waktu Bagdad yang diawali serangan serangan udara masif atas Bagdad dan beberapa

wilayah Irak lainnya. Korban jiwa dan kehancuran infrastruktur tak bisa terelakkan. Setelah dua bulan perang yang merenggut ribuan nyawa, pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil mengalahkan Iraq. Perang selesai dengan terbebasnya Kuwait dari cengkeraman Iraq.

Dampak Perang Teluk Bagi Diaspora Palestina

Sebelum menjelaskan dampak perang Teluk terhadap diaspora Palestina, ada baiknya kita mengetahui hubungan persahabatan antara Palestina-Irak dan Palestina-Kuwait. Selama ini Palestina menjalin hubungan yang sangat baik dengan Iraq maupun dengan Kuwait. Selama ini Iraq terkenal sebagai sekutu terbesar Palestina dalam perang melawan Israel. Dalam setiap konflik bersenjata melawan Israel (tahun 1948, 1967, 1968 and 1973) Iraq tak pernah absen mengirim pasukan. Adapun Kuwait yang tidak memiliki kekuatan militer sebesar Iraq lebih sering membantu Palestina secara finansial. Apalagi besarnya jumlah orang Palestina yang bekerja di Kuwait menyumbang devisa yang besar. Masalah terjadi ketika dua sahabat Palestina berseteru. Palestina dihadapkan pada pilihan sulit, dimanakah ia harus memposisikan diri?

Palestina tidak secara eksplisit keberfihakannya pada Iraq atau Kuwait, namun saat perang Teluk terjadi, Palestina dianggap lebih berfihak pada Iraq berdasarkan beberapa hal berikut ini: 1) Yasser Arafat, presiden Palestina saat itu lebih dekat dengan Saddam Hussein, presiden Irak dibanding dengan Sheikh Jaber, pemimpin Kuwait 2) Saat sidang darurat Liga Arab tanggal 10 Agustus 1991, Palestina adalah salah satu negara yang tidak menyetujui serangan militer untuk menghentikan invasi Iraq ke Kuwait 3) Massifnya pemberitaan di media massa, baik lokal maupun internasional yang menuduh Palestina sebagai pendukung utama invasi Iraq. Apalagi saat itu beredar foto Saddam

dan Yasser berpelukan yang menjadi viral dan menuai kecaman.



Gambar 04: Yasser Arafat dan Saddam Hussein. Sumber: CNN

Palestina tidak secara eksplisit keberfihakannya pada Iraq atau Kuwait, namun saat perang Teluk terjadi, Palestina dianggap lebih berfihak pada Iraq berdasarkan beberapa hal berikut ini: 1) Yasser Arafat, presiden Palestina saat itu lebih dekat dengan Saddam Hussein, presiden Irak dibanding dengan Sheikh Jaber, pemimpin Kuwait 2) Saat sidang darurat Liga Arab tanggal 10 Agustus 1991, Palestina adalah salah satu negara yang tidak menyetujui serangan militer untuk menghentikan invasi Iraq ke Kuwait 3) Massifnya pemberitaan di media massa, baik lokal maupun internasional yang menuduh Palestina sebagai pendukung utama invasi Iraq. Apalagi saat itu beredar foto Saddam dan Yasser berpelukan yang menjadi viral dan menuai kecaman.

Kebijakan Palestina yang tidak suportif pada Kuwait berdampak sangat fatal bagi diaspora Palestina di Kuwait. Mereka dianggap ikut bersimpati, membela, dan mendukung kebijakan “negara” Palestina yang pro Iraq. Mereka mulai dianggap sebagai pengkhianat, ‘tidak tahu diri’, “fifth columnist” (istilah dalam politik untuk orang dalam yang bersimpati pada musuh) dan sebutan-sebutan buruk lainnya. Kampanye untuk mengusir orang Palestina dari Kuwait semakin massif. Orang-orang Palestina

disana mulai mengalami persekusi, kekerasan dan pengusiran besar-besaran.

Dalam sebuah wawancara tanggal 21 Februari 1991 dengan The Independent, Sheikh Saad al-Abdullah al-Sabah, putra mahkota Kuwait yang saat itu sedang mengungsi di Saudi Arabia menyerukan "pembersihan" Kuwait dari para pengkhianat. Walau tidak secara gamblang menyebut siapakah pengkhianat itu namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pada tanggal 9 Juli 1991, Jaksa Agung Kuwait Hamed Othman mengatakan kepada USA Today, "Setiap negara memiliki hak untuk mendeportasi orang yang dianggap berisiko terhadap keamanan. Di negara lain seperti Inggris dan Amerika hal itu juga sering dilakukan." Sheikh Saud Nasser al-Sabah, duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat menyatakan: "Kami kecewa dengan sikap Yaser Arafat dan orang-orang Palestina yang seakan berkolaborasi menghancurkan Kuwait. Terlalu banyak orang Palestina di Kuwait juga tidak ada faedahnya bagi stabilitas keamanan kami" (Rosen, 2012)

Tahun 1990 diperkirakan ada 350.000 jumlah diaspora Palestina di Kuwait. Dalam kurun waktu 3 bulan saja (Agustus- Oktober 1990), lebih dari 200.000 orang Palestina terpaksa meninggalkan Kuwait baik karena takut akan persekusi maupun alasan lainnya seperti kesulitan finansial dan kekurangan perawatan medis akibat perang yang berkecamuk (Schulz, 2005). Hal ini diperparah oleh PHK massal orang Palestina dari seluruh sektor pekerjaan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perusahaan besar hingga usaha kecil dan menengah. Sentimen anti Palestina semakin memanas di segala penjuru Kuwait. Konflik memuncak menjelang pembebasan Kuwait dari pendudukan Irak di bulan Maret 1991. Sekuat apapun militer Irak, tak akan mampu melawan pasukan koalisi yang dimotori negara-negara dengan militer raksasa seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Minggu terakhir bulan Maret 1991 menjadi kiamat kedua setelah peristiwa An- Nakba

1948. Diaspora Palestina yang tersisa dipaksa meninggalkan Kuwait hanya dalam waktu satu pekan saja.

| Palestinian Residents in Kuwait | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| Year | Number | % of Population |
| 1957 | 15,173 | 7.30 |
| 1961 | 37,482 | 11.70 |
| 1965 | 77,712 | 16.60 |
| 1970 | 147,696 | 20.00 |
| 1975 | 204,178 | 20.50 |
| 1981 | 299,710 | 20.90 |
| 1990 | 400,000* | 18.70 |
| 1995 | 26,000 | 0.01 |
| * Other estimates say 450,000 | | |

Gambar 05: Jumlah Diaspora Palestina di Kuwait dari masa ke masa
 Sumber: Rosen, S.J. (2012)

Masa-masa indah yang dinikmati diaspora Palestina di Kuwait kini tinggal kenangan. Dari 400.000 populasi Palestina di Kuwait sebelum perang Teluk, turun drastis hingga hanya 70.000 orang pasca Perang Teluk dengan kondisi, pekerjaan dan kesempatan yang tentunya lebih terbatas dari sebelumnya (Lesch & Lustick, 2005). Terusirnya warga Palestina dari Kuwait tak hanya merugikan Palestina tapi juga merugikan Kuwait itu sendiri. Dari segi ekonomi, Kuwait kehilangan banyak sekali pendapatan dari bidang jasa. Perputaran uang Palestina-Kuwait sangatlah besar. Orang Palestina, baik itu diaspora Palestina di Kuwait maupun orang Palestina di Palestina sering sekali saling mengunjungi kerabatnya dan banyak yang membelanjakan uangnya di Kuwait. Dari segi tenaga kerja, para pekerja baru yang menggantikan orang Palestina dianggap kurang profesional dan berkinerja rendah yang tentunya berdampak pada pembangunan di Kuwait pasca perang. Yang paling memprihatinkan adalah meningkatnya sentiment anti-Non-Kuwait yang membuat Kuwait menjadi negara yang kurang heterogen, kurang toleran dan kurang menghargai pluralism dan perbedaan (Al-Nakib, 2014). Saat artikel ini ditulis, diaspora Palestina hanya tersisa ribuan saja. Mereka

menjadi minoritas yang low profile, marjinal, dan tak lagi berkontribusi besar bagi pembangunan Kuwait.

Kesimpulan

Sebelum perang Teluk, Diaspora Palestina di Kuwait telah membuktikan diri sebagai salah satu elemen negara yang telah terintegrasi dengan baik dengan masyarakat Kuwait. Diaspora Palestina menganggap Kuwait sebagai “rumah kedua” yang tak hanya menjadi tempat berlindung namun juga tempat mencari penghidupan. Mereka turut merawat rumah bersama ini agar tetap aman dan nyaman. Sayang sekali peristiwa Perang Teluk tahun 1990-1991 merubah segalanya. Kombinasi antara ambisi politik Iraq, kepentingan negara-negara besar dunia (AS dan sekutunya), miskalkulasi Palestina tentang siapa kawan siapa lawan, serta sentiment nasionalisme Kuwait yang berlebihan membuat diaspora Palestina menjadi korban. Eksodus dari tanah Kuwait membuktikan bahwa kesamaan agama, bahasa, dan budaya tak selalu jadi alat pemersatu. Semuanya kalah oleh ambisi, egoism dan kepentingan sesaat.

Daftar Pustaka

- Al-Nakib, M. (2014). The People are Missing: Palestinians in Kuwait. *Deleuze Studies Journal*. 8 (1), 23–44
- Clemens, M.S (2007). The Influence of Refugee Status on Palestinian Identity and the Impact of Identity on Durable Solutions to the Refugee. *Nebraska Anthropologist*. 28 (1). 96-112
- Damanuri, A. (2014). Muslim Diaspora dalam Isu Identitas, Gender, dan Terorisme. *Islamica- Jurnal Studi Keislaman*, 6 (2), 232-251.
- Garini, A. (2006). Pengungsi Palestina di Lebanon: 1948-1969. Skripsi. Universitas Indonesia
- Kimmerling, B & Migdal, J.S. (2006). *The Palestinian People: A History*. Cambridge: Harvard University Press
- Missbach, A. (2011). *Politics and Conflict in Indonesia: The Role of Acehnese Diaspora*. New York: Routledge.
- Richter-Devroe, S. (2021). Palestinian Refugees of the Oslo Generation: Thinking Beyond the Nation?. *Jurnal of Palestine Studies*, 50 (3), 18-36.
- Syuib, M. (2016). Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Justisia*, 1 (1), 39-49.
- Sujatmiko, E. (2014). *Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial*. Surakarta: Aksara Sinergi Media
- Schulz, H. L. (2003). *The Palestinian Diaspora*. London : Routledge Publisher
- Peteet, J. (2007). Problematizing Palestinian Diaspora. *International Journal of Middle East Studies*, 39 (4), 627- 646.
- Rosen, S.J. (2012). Kuwait Expels Thousands of Palestinians. *Middle East Quarterly*, 19 (4), 75- 83
- Lesch, A. M. dan Lustick I. S., (2005). *Exile and Return: Predicaments of Palestinians and Jews*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.